

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan cara penerapan program P4GN yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Barat. Berdasarkan hasil dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pelaksana program P4GN oleh BNNP Sumatera Barat belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dapat terlihat dari variabel-variabel yang diungkapkan oleh Donald Van Meter dan Van Horn yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian, jika dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, BNNP Sumatera Barat sebenarnya telah memahami dengan mendalam fokus utama tugasnya melalui penetapan prioritas dalam memutus rantai permintaan narkoba yang sesuai dengan pedoman dari BNN RI. Namun, terdapat kekurangan mendasar pada aspek sumber daya, di mana jumlah tenaga manusia sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk ruang lingkup provinsi, seperti bagian pencegahan yang hanya diisi oleh sembilan orang, bidang rehabilitasi yang memiliki empat konselor, dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh satu orang saja. Masalah ini semakin diperburuk oleh ketidakcukupan sumber daya finansial, di mana sebagian besar anggaran tahun 2025 dialokasikan untuk kebutuhan administrasi internal birokrasi, sementara dana untuk tindakan pencegahan yang nyata di lapangan sangat minim. Keterbatasan sumber daya ini juga berdampak langsung pada aspek komunikasi, di mana penyebaran informasi mengenai P4GN kepada masyarakat berlangsung

dengan sangat rendah, dengan total hanya 23 kegiatan sepanjang tahun 2024, bahkan mencatatkan angka nol dalam penggunaan media siaran dan media online. Di sisi lain, dalam konteks kondisi sosial, keberhasilan program terhalang oleh stigma negatif yang kuat serta penolakan masyarakat terhadap mantan pengguna yang telah berhasil menjalani rehabilitasi, sehingga menciptakan celah kerentanan sosial yang berpotensi membuat mereka terjerumus kembali. Pada kondisi ekonomi, keterbatasan finansial atau kondisi ekonomi makro daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada penguatan program ikut membatasi ruang gerak peyuluhan mandiri di tingkat lokal.

6.2 Saran

1. BNNP Sumatera Barat disarankan untuk terus memperkuat pola kerja kolaboratif lintas unit yang sudah berjalan, di mana bidang pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dapat saling mendukung secara berkala dalam pelaksanaan program pencegahan di lapangan.
2. BNNP Sumatera Barat tidak boleh hanya bergantung pada alokasi DIPA APBN. Saran praktis dapat diimplementasikan adalah dengan memperluas skema kemitraan strategis non DIPA bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta berbagai dinas terkait.
3. BNNP Sumatera Barat disarankan melakukan transformasi taktis dalam strategi komunikasi publiknya. Penyusunan konten edukasi yang kreatif, interaktif, dan ramah generasi muda harus dioptimalkan melalui platform digital berbiaya rendah namun berdampak luas.

4. BNNP Sumatera Barat perlu merancang program edukasi publik yang berfokus pada penerimaan sosial. Sosialisasi P4GN tidak boleh hanya berhenti pada bahaya narkoba, tetapi juga harus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya peran kontrol sosial yang merangkul dan mendukung pemulihan mantan pengguna.

